

## Determinan kemiskinan di provinsi daerah istimewa yogyakarta

**Sodik Dwi Purnomo**

Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708, Purwokerto.  
Email : sodikdwipurnomo@yahoo.com

### Abstrak

Persentase kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode 2003 - 2017 selalu mengalami penurunan namun ditahun yang sama persentase kemiskinannya selalu lebih tinggi dari kemiskinan Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003-2017. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan model *Ordinary Least Square* (OLS) dan data yang digunakan yaitu data sekunder atau data times series. Dalam mengolah data, penulis menggunakan bantuan software Eviews 8. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Kemiskinan; times series; inflasi; tingkat pengangguran terbuka; indeks pembangunan manusia

### *Determinants of poverty in the province of the special region of yogyakarta*

#### *Abstract*

*The percentage of poverty in the Special Region of Yogyakarta Province from periode 2003 - 2017 has always decreased but in the same year the percentage of poverty is always higher than National poverty. This study aims to analyze the effect of inflation, the open unemployment rate, and the human development index on poverty in the Yogyakarta Special Region in 2003-2017. The analytical method used is multiple linear regression with the Ordinary Least Square (OLS) model approach and the data used are secondary data or times series data. In processing data, the author uses the help of software Eviews 8. Based on the results of the analysis and testing of hypotheses obtained the results that the inflation variable and unemployment rate have a positive and significant effect on the poverty rate in Yogyakarta Special Region. The variables of human development index have a significant negative effect on the poverty rate in the Special Region of Yogyakarta.*

**Keywords:** Poverty; times series; inflation; open unemployment rate; human development index

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi masalah besarnya angka kemiskinan. Kemiskinan ditandai dengan rendahnya pendapatan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi (Arsyad, 2010).

Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat artinya angka kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita yang rendah terjadi karena investasi per kapita yang juga rendah. Tingkat investasi per kapita yang rendah disebabkan oleh permintaan domestik per kapita yang rendah juga dan hal tersebut terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan. Sebagai sebuah hubungan sebab akibat (Nurkse dalam Kuncoro, 2010).

Menurut Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang 633,2 ribu orang menjadi 25,95 juta jiwa atau 9,82 persen dibandingkan dengan kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta jiwa atau 10,12 persen Indonesia atau sekitar 31,02 juta jiwa. Hal ini dikarenakan, meningkatnya jumlah bantuan sosial tunai pemerintah sebesar 87,6 persen selama triwulan pertama 2018. Hal ini berkontribusi pada naiknya kemampuan belanja rumah tangga masyarakat miskin sebesar 3,06 persen selama periode September 2017 sampai dengan Maret 2018. Selain itu program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan pertama telah tersalurkan sesuai jadwal (BPS, 2018).

Program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah pusat sampai saat ini memang telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam pendidikan dasar, memenuhi kebutuhan dasar, seperti akses terhadap air bersih, listrik, jaminan kesehatan, dan lain-lain. Namun kebijakan tersebut belum secara komprehensif mengentaskan kemiskinan dengan cepat dan menyeluruh terutama dari sisi ekonomi (Saragih, 2015)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, menargetkan angka kemiskinan pada akhir tahun 2019 adalah sebesar 8,0 sampai dengan 7,0 persen dari total penduduk Indonesia (TNP2K, 2018). Berikut ini Tabel 1 yang menunjukkan proyeksi angka kemiskinan yang tertuang pada RPJMN tahun 2015 sampai dengan 2019.

Tabel 1. Proyeksi angka kemiskinan dan angka terealisasi di Indonesia 2015-2019 (%)

Tahun	Proyeksi Kemiskinan	Terealisasi
2015	9,5 - 10,5	11,76
2016	9,0 - 10,0	10,78
2017	8,5 - 9,50	10,12
2018	7,5 - 8,80	9,82*
2019	7,0 - 8,0	-

Sumber: RPJMN, 2015-2019

Tabel 1 menunjukkan proyeksi angka kemiskinan dan terealisasi di Indonesia. Selama tahun 2015 sampai dengan 2018 proyeksi angka kemiskinan tidak pernah tercapai. Walaupun proyeksi angka kemiskinan tidak tercapai, tetapi persentase kemiskinan selalu mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya dalam menggurangi kemiskinan dengan program dan kebijakan yang cukup strategis. Namun kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang memuaskan. Pada faktanya masih banyak daerah di Indonesia yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari nasional. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan guna mengurangi angka kemiskinan, baik nasional maupun daerah.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berada di Pulau Jawa. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Berikut Tabel 2 yang menunjukkan perbandingan persentase kemiskinan DIY dan Indonesia.

Tabel 2 menunjukkan persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi DIY. Tahun 2018 sampai dengan 2017 persentase kemiskinan di Indonesia dan Provinsi DIY mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun walaupun di DIY mengalami penurunan tapi persentase kemiskinannya lebih besar

daripada Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakakuratan data penerima manfaat, sehingga orang yang berhak menerima bantuan malah tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, masalah paling signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY adalah tingginya angka *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* berarti warga yang masuk dalam kategori mampu, tetapi warga terdaftar mendapat bantuan, sedangkan *exclusion error*, sebaliknya, yaitu warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan.

Tabel 2. Persentase Kemiskinan Indonesia dan DIY 2008 – 2018 (%)

Tahun	Indonesia	DIY
2008	15,42	18,32
2009	14,15	17,23
2010	13,33	16,83
2011	12,49	16,08
2012	11,80	15,96
2013	11,42	15,23
2014	11,11	14,77
2015	11,76	14,03
2016	10,78	13,25
2017	10,12	12,69

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018

Kebijakan pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi angka kemiskinan sudah melalui koordinasi yang cukup baik dengan pemerintah pusat. Beberapa program yang digalakkan pemerintah pusat dan DIY yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Beras Sejahtera, bantuan hunian sederhana dengan nama Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Selain itu juga ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang juga diterapkan di seluruh Indonesia (Kementerian Sosial, 2018)

Dengan adanya perencanaan strategi atau program yang baik yang dapat diterapkan dengan efektif, sehingga dapat mengurangi jumlah kemiskinan dalam jangka panjang yang perlu didasari dengan data pendukung yang akurat. Dengan demikian yang melatarbelakangi penelitian ini adalah terjadi penurunan persentase kemiskinan di Provinsi DIY dan persentase kemiskinan selalu lebih tinggi dari kemiskinan Nasional, sehingga penelitian ini perlu dilakukan.

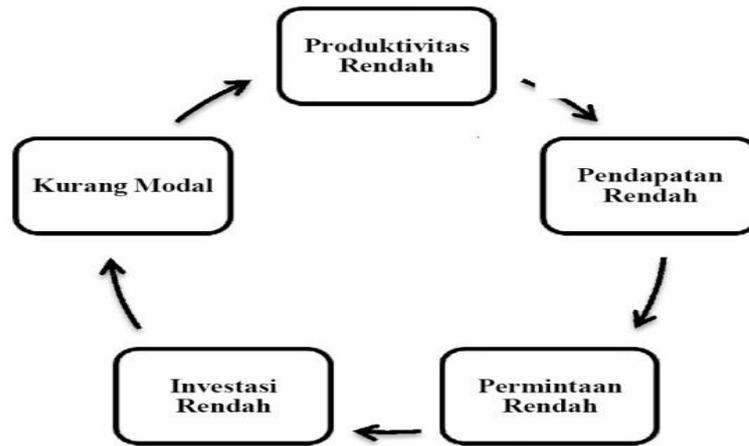
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian, apakah inflasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap angka kemiskinan di DIY tahun 2003 sampai dengan 2017.

## Tinjauan Pustaka

### Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) sebagaimana yang dikatakan oleh Ragnar Nurkse dalam Kuncoro (2010) “a poor country is poor because it is poor”, dengan kata lain negara miskin itu disebabkan masyarakatnya miskin. Modal yang terbatas dengan pasar yang tidak sempurna serta adanya keterbelakangan, menyebabkan produktivitas rendah. Produktivitas rendah menyebabkan upah yang diterima rendah. Upah atau pendapatan rendah akan berakibat langsung terhadap rendahnya konsumsi, tabungan maupun investasi. Rendahnya investasi berdampak kembali pada keadaan awal seperti keterbelakangan dan seterusnya, sehingga jika digambarkan akan membentuk suatu lingkaran.



Gambar 1.  
Lingkaran Setan Kemiskinan ( *The Vicious Circle of Poverty* )  
Sumber: Kuncoro, (2000)

### Inflasi

Inflasi kondisi yang menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus pada periode waktu tertentu. Umum artinya kenaikan harga barang tidak hanya pada satu jenis, tetapi kenaikan itu meliputi kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain dipasar. Terus menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja (Imelia, 2012).

Inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan bahwa tingginya tingkat inflasi, sehingga dampak dari inflasi yang tinggi adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat dan mengakibatkan masyarakat hidup di bawah garis miskin (Case dan Fair, 2014).

### Pengangguran

Angka pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja disuatu negara (Sumarsono, 2009). Menurut BPS, 2010 pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja. Dalam temuan Tisna, 2008 menemukan bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan. Angka pengangguran dengan tidak adanya pendapatan akan memengaruhi kemiskinan dikarenakan penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Angka pengangguran dapat menyebabkan berbagai masalah ekonomi dan sosial, dan akan berdampak pada pendapatan yang berakibat dapat menyebabkan kesejahteraan masyarakat akan merosot. Tingginya angka pengangguran secara ekonomi berpeluang menurunkan kesempatan dalam peningkatan produktivitas regional, dan secara sosial mencerminkan semakin besarnya beban bagi masyarakat (Mahsunah, 2012)

### Indek pembangunan manusia

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP), dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas, standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. (Nurmainah, 2013).

Menurut Lanjouv, *at all* (2001) mengemukakan bahwa indeks pembangunan manusia di Indonesia adalah indetik dengan pengurangan angka kemiskinan. Investasi di bidang kesehatan dan

pendidikan lebih berpengaruh terhadap penduduk miskin, karena bagi penduduk miskin aset yang dimilikinya hanya tenaga kasar. Dengan adanya fasilitas dan akses akan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi penduduk miskin akan membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya akan memengaruhi peningkatan pendapatan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data *times series* atau runtun waktu. Bentuk analisis yang menggunakan data sekunder dari tahun 2003 sampai dengan 2012 yang bersumber dari BPS, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DIY, serta sumber lainnya yang berasal dari penelitian sebelumnya.

Model penelitian menggunakan pendekatan regresi dengan metode Ordinary Least Square. Dalam pembahasan mencakup estimasi hubungan beberapa faktor terhadap kemiskinan di DIY seperti, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia. Untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu determinan kemiskinan kemiskinan di DIY, maka digunakan alat analisis regresi linier berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kemsikinan (%)

X1 : Inflasi (%)

X2 : Tingkat pengangguran terbuka (%)

X3 : Indek pembangunan manusia (%)

### Pengujian asumsi klasik

#### Uji normalitas

Uji normalitas diperlukan dalam suatu penelitian dengan tujuan penaksiran dan pengujian hipotesis. Untuk itu digunakan uji histogram normality test. Bila hasil uji ini menunjukkan nilai probability lebih besar dari tingkatan signifikan yang digunakan (0,05) maka distribusi data menyebar dengan normal dan sebaliknya.

#### Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menentukan dan mengetahui ada tidaknya hubungan dua atau lebih variabel yang saling berkaitan dalam suatu model. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan deteksi klien. Deteksi klien dilakukan dengan melakukan regresi suatu variabel independen dengan variabel independen lain. *Rule of thumb* dengan membandingkan nilai  $R^2$  model dengan nilai  $R^2$  Auxiliary. Bila nilai  $R^2$  regresi Auxiliary lebih besar nilai  $R^2$  model, maka model mengandung gejala multikolinieritas. Bila nilai  $R^2$  regresi Auxiliary lebih kecil nilai  $R^2$  model, maka model tidak mengandung gejala.

#### Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan (Algifari, 2000). Untuk menguji tidak adanya heteroskedastisitas, dapat diketahui dengan melakukan uji gleser. Untuk menerima asumsi klasik bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, nilai probabilitasnya harus lebih besar dari alfa ( $\alpha=5\%$ ) (Gujarati, 2004).

#### Uji autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dalam sebuah model regresi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi maka dibutuhkan sebuah metode pengujian Breusch-Godfrey Metode ini berdasarkan pada nilai F dan  $Obs \cdot R\text{-squared}$ , dimana jika nilai probabilitas dari  $Obs \cdot R\text{-squared}$  melebihi tingkat kepercayaan, maka  $H_0$  diterima. Artinya tidak ada masalah autokorelasi (Gujarati, 2003).

### Pengujian secara statistik

#### Uji koefisien determinasi yang disesuaikan $R^2$ adj

Menurut Gujarati (2004) koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terganggunya.  $R^2$  merupakan besaran non negatif dengan batas yaitu  $0 < R^2 < 1$ . Jika

---

nilai koefisien determinasi semakin tinggi atau mendekati angka 1 (satu), maka semakin tinggi pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependennya..

#### **Uji secara bersama-sama (uji statistik f)**

Menurut Gujarati (2015) uji F secara bersama-sama atau simultan digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependennya. Jika variabel independen memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependennya maka model persamaan regresi dapat dikatakan cocok atau *fit*.

#### **Uji parsial (uji statistik t)**

Digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial terhadap variabel dependennya. Suatu variabel akan memiliki pengaruh signifikan jika nilai  $t_{hitung}$  variabel tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ .

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Regresi linier berganda**

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y=11,495+0,143X_1+0,435X_2-0,765X_3$$

Nilai konstanta sebesar 11,495 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka variabel dependen adalah 11,495.

Nilai koefisien regresi variabel inflasi sebesar 0,143 artinya variabel inflasi berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Hal ini artinya apabila inflasi bertambah satu persen maka dapat meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,143 persen.

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,435 artinya variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Hal ini artinya apabila tingkat pengangguran terbuka bertambah satu persen maka dapat meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,435 persen.

Nilai koefisien regresi variabel indeks pembangunan manusia sebesar 0,765 artinya variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap angka kemiskinan. Hal ini artinya apabila indeks pembangunan manusia bertambah satu persen maka dapat meningkatkan angka kemiskinan sebesar 0,435 persen.

#### **Uji asumsi klasik**

##### **Uji normalitas**

Untuk menguji normalitas dilakukan analisis histogram normality test hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,592 atau lebih besar dibandingkan dengan nilai  $\alpha$  (0,05), sehingga distribusi data variabel penelitian adalah normal.

##### **Uji Multikolinearitas**

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia menghasilkan nilai Auxiliary  $\leq$  nilai R<sup>2</sup> model. Jadi dapat diartikan bahwa hasil uji kolinieritas di atas tidak terjadi multikolinearitas

##### **Uji heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square sebesar 0,217. Berdasarkan kriteria bahwa nilai probabilitas chi-square lebih besar dari tingkat signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka uji di atas tidak terdapat heteroskedastisitas.

##### **Uji autokorelasi**

Berdasarkan uji autokorelasi dengan menggunakan Breusch – godfrey test (BG). Dan berdasarkan uji (BG) dapat dijelaskan bahwa nilai probabilitas chi-square (2) menunjukkan nilai 0,3535. Berdasarkan kriteria nilai 0,3535 lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar ( $\alpha = 0,05$ ) maka uji di atas tidak terdapat masalah autokorelasi.

#### **Pengujian secara Statistik**

##### **Uji adjusted r square (koefisien determinasi)**

Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai koefisien R<sup>2</sup> sebesar 0,95 nilai tersebut mendekati nilai 1, dengan demikian inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap angka kemiskinan di DIY. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan presentase sebesar 95 persen, sedangkan sisanya 5 persen

perubahan besarnya angka kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

### Uji F

Dari hasil estimasi model persamaan regresi maka diperoleh F-hitung sebesar 99,334 sedangkan nilai F-tabel sebesar 3,891 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $99,334 > 3,891$ ), artinya  $H_0$  ditolak. Kesimpulan hipotesis yang menyatakan variabel inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap angka kemiskinan di DIY diterima.

### Uji parsial (uji t)

Dari hasil analisis dengan menggunakan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) = 0,05 diketahui nilai thitung sebesar 0,765. Dari nilai ttabel maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Nilai thitung variabel inflasi sebesar 2,370 dan nilai ttabel diperoleh sebesar 0,675. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung  $>$  ttabel sehingga  $H_a$  diterima, berarti hipotesis yang menyatakan variabel inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY dapat diterima.

Nilai thitung variabel tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,569 dan nilai ttabel diperoleh sebesar 0,675. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung  $>$  ttabel sehingga  $H_a$  diterima, berarti hipotesis yang menyatakan variabel tingkat pengangguran terbuka secara parsial berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY dapat diterima.

Nilai thitung variabel indeks pembangunan manusia sebesar 7,467 dan nilai ttabel diperoleh sebesar 0,675. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung  $>$  ttabel sehingga  $H_a$  diterima, berarti hipotesis yang menyatakan variabel indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY dapat diterima.

### Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di diy

Variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Hal ini sesuai dengan temuan Mustamin dkk (2015) bahwa inflasi berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan inflasi berpengaruh terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Inflasi berdampak pada dunia usaha dengan mengurangi jumlah produksi. Dengan demikian akan berdampak pada kesempatan kerja akan berkurang, sehingga berdampak pendapatan masyarakat akan menurun. Namun inflasi akan berdampak parah bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, dimana dengan adanya inflasi kemampuan daya beli masyarakat yang berpendapatan tetap akan menurun.

Menurut Imelia (2012) inflasi yang tak terkendali akan berpengaruh diberbagai sektor perekonomian, sehingga akan menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran, yang pada hilirnya akan berengaruh pada kesejahteraan masyarakat teruntuk pada masyarakat yang berpendapat rendah ataupun menurun.

### Pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di diy

Tingkat pengangguran akan menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi, sosial, dan budaya yang akan berdampak pada kesejahteraan akan menurun. Semakin menurun kesejahteraan yang diakibatkan pengangguran maka masyarakat akan terjebak pada kemiskinan (Mahsunah, 2012).

Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Temuan ini sejalan dengan Permana dan Arianti (2012) bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh langsung dan signifikan terhadap angka kemiskinan. Menurut Barika (2013) penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran, ini akan berdampak pada seseorang yang tidak mampu membiayai kebutuhan hidup dirinya dan keluarga, sehingga akan tergolong pada kategori miskin.

Namun temuan ini berbeda dengan Amelia (2012) bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara empiris pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan dikarenakan pendapatan keluarga yang cukup tinggi akan mampu menopang biaya hidup anggota keluarga yang masih menganggur atau yang belum bekerja.

### Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di diy

---

Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap angka kemiskinan di DIY. Hal ini sesuai dengan temuan Susanti (2013) dan Nurmainah (2013) bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan dengan IPM yang tinggi maka masyarakat akan memiliki keterampilan, pendidikan, dan kesehatan jasmani maupun rohani masyarakat akan lebih mampu berinovasi dan berdaya saing. Dengan ini dapat diharapkan produktivitas akan meningkat dan pada akhirnya akan menurunkan angka kemiskinan.

Menurut temuan Zuhdiyaty dan David (2017) yang mengemukakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan selaras dengan pernyataan Arsyad (2010) yaitu salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Apabila nilai IPM meningkat maka kualitas dan kemampuan sumber daya manusia juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan produktivitas masyarakat akan meningkat. Dengan peningkatan produktivitas makan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian angka kemiskinan akan berkurang.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, variabel inflasi dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Daerah istimewa Yogyakarta tahun 2003-2017.

Variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2003 – 2017.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajija, Shochrul. et al. (2011). Cara cerdas menguasai Eviews. Jakarta: Salemba Empat.
- Algifari. (2000). Analisis Regresi, Teori, Kasudan Teori. Yogyakarta. BPF.
- Arsyad, Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta. Penerbit STIE YKPN
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat , 2018. Statistik Indonesia Tahun 2018. . Jakarta. Pusat Badan Pusat Statistik.
- Barika. (2013). Effect Of Economic Growth, Government Spending, Unemployment and Inflation On the Level Of Poverty in Sumatra Province. Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan. 5 (1). Hal. 27 – 36
- Case & Fair. (2004). Prinsip-prinsip Ekonomi Makro. Jakarta. PT Indeks
- Deny Tisna A., (2008) Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004. Diponegoro Journal Of Economics (Onlin).
- Gujarati, Damodar. (2000). Ekonometrika Dasar. Erlangga. Jakarta.
- Imelia. (2012). Pengaruh Inflasi Terhadap Kemiskinan di Propinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika.1 (5). Hal. 42 – 48
- Kementerian Sosial. (2016). Analisis Data Kemiskinan Berdasarkan Data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. Jakarta. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Lanjouw, P, et.al. (2001). Poverty, Education and Health in Indonesia:Who Benefits from Public Spending?. World Bank Working Paper No. 2739. Washington D.C.: World Bank. <http://papers.ssrn.com>

- 
- Mahsunah, Durrotul. (2012). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.
- Mustamin, Siti Wilda, dkk. (2015). Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Analisis*. 4 (2). Hal. 165 – 173
- Nurmainah, Santi. (2013). Analisis Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah ,Tenaga Kerja Terserap Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*. 20 (2). Hal. 131 – 141
- Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal Of Economics (Online)*. 1 (1). Hal. 17 – 31
- Saragih, Juli P. (2015). Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 6 (1). Hal. 45 – 59
- Sumarsono, Sonny. (2009). Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Susanti, Sussy. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*. 9 (1). Hal 1 – 18
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2018). Penganggulan kemiskinan: situasi terkini, target pemerintah, dan progam percepata. Jakarta.
- UNDP. 1997. Governance for Sustainable Development – A Policy Document. [UNDP.Newhdr.undp.org/sites/default/file/reports/258/hdr\\_1997\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://UNDP.Newhdr.undp.org/sites/default/file/reports/258/hdr_1997_en_complete_nostats.pdf)
- Yacoub, Yarlina. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Eksos*. 8 (3). Hal. 176 – 185
- Zuhdiyaty, Noor. (2017). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). *JIBEKA*. 11 (2). Hal. 27 – 31